



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

**PENGARAHAN GUBERNUR SELAKU KETUA
DEWAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI
KALIMANTAN BARAT
PADA ACARA RAPAT KOORDINASI DEWAN
KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Tanggal 28 Agustus 2008

Pukul 09.00 WIB

Tempat Gedung Pertemuan Sun Moon
Jl. Kalimantan Kota Singkawang

Yang saya hormati:

- Saudara Para Bupati dan Walikota selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat beserta jajarannya.
- Saudara Kepala Badan, Kepala Dinas, selaku Anggota Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat yang saya hormati.

Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang di Singkawang khususnya kepada Saudara para Bupati/Walikota beserta jajarannya dan para undangan. Teriring ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena bersedia hadir memenuhi undangan kami dalam Rapat Dewan Ketahanan Pangan ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan juga saya sampaikan kepada Walikota Singkawang yang bersedia menjadi tuan rumah rapat ini.

Mengawali pertemuan kita pada hari ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini di tempat ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Sdr Bupati/Walikota dan peserta Rapat yang saya hormati.

1. Kita tentu sama-sama memahami bahwa pangan merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi manusia, oleh sebab itu tuntutan pemenuhan pangan merupakan pemenuhan hak azasi setiap individu. Selain itu, pangan sangat menentukan kualitas sumber daya manusia yang juga berarti menentukan kualitas suatu bangsa. Oleh sebab itu, kita tentu sepakat masalah pangan merupakan hal yang prioritas untuk kita tangani.
2. Berdasarkan pasal 45 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dinyatakan bahwa pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan ketahanan pangan, hal itu ditegaskan lagi pada pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan yang menyebutkan bahwa pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan desa melaksanakan kebijakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan di wilayah kerjanya masing-masing. Hal ini juga ditegaskan kembali dalam PP 38 Tahun 2007 yang menetapkan ketahanan pangan sebagai urusan wajib pemerintah daerah.
3. Kompleksnya aspek yang terkait dengan ketahanan pangan ini menghendaki keterlibatan dan tanggung jawab banyak pihak. Sehubungan dengan hal itu dibentuk Dewan Ketahanan Pangan pada berbagai tingkatan pemerintahan yang melibatkan berbagai *stakeholders* baik pemerintah maupun swasta dan masyarakat.
4. Pertemuan Dewan Ketahanan Pangan pada hari ini saya nilai memiliki anti yang sangat penting mengingat pada saat ini banyak negara sedang dihadapkan pada krisis pangan, antara lain ditandai dengan naiknya harga bahan pangan di pasaran dunia, hal ini juga telah memicu naiknya harga beberapa bahan pangan secara signifikan di dalam negeri termasuk di Kalimantan Barat. Kondisi ini sudah tentu akan memberikan pengaruh yang kurang baik bagi ketahanan pangan kita.
5. Walaupun secara keseluruhan produksi bahan pangan kita khususnya beras dinyatakan cukup, akan tetapi hal itu tidak serta merta menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat dan seluruh wilayah.

Disebabkan beberapa daerah masih mengalami kekurangan beras dan harus mendatangkan dari luar, sementara itu beberapa daerah juga masih di hadapkan pada kondisi sarana dan prasarana transportasi yang terbatas sehingga alur bahan pangan tidak begitu lancar dan memerlukan biaya yang relatif mahal.

Dengan adanya kenaikan harga bahan pangan yang cukup signifikan seperti yang terjadi saat ini dapat berakibat pada terganggunya akses masyarakat terhadap bahan pangan terutama bagi kelompok masyarakat miskin dan pengangguran.

6. Masalah lain yang masih menjadi persoalan kita di bidang pangan adalah menyangkut aspek konsumsi. Sampai saat ini konsumsi sebagian besar masyarakat kita masih didominasi oleh beras, sementara konsumsi bahan pangan lainnya seperti umbi-umbian, kacang-kacangan, pangan hewani, maupun sayur dan buah di bawah anjuran. Kondisi ini tentu tidak menguntungkan baik ditinjau dari sisi kesehatan maupun dan sisi upaya kemandirian pangan. Dari sisi kesehatan pola konsumsi yang baik adalah pola konsumsi yang dapat memberikan asupan gizi yang cukup yang dapat meningkatkan kesehatan sekaligus kemampuan inteligensia khususnya bagi Balita. Mengingat masing-masing bahan pangan memiliki kandungan gizi yang berbeda maka semakin beragam pangan yang kita konsumsi maka akan semakin lengkap pula zat gizi yang kita butuhkan dapat dipenuhi.
7. Dari segi kemandirian pangan, kita dihadapkan pada akan terus bertambahnya jumlah penduduk yang berarti memerlukan penambahan pangan untuk dikonsumsi. Kalau pada saat ini kita masih memiliki cukup peluang untuk meningkatkan produksi pangan tertentu seperti beras, maka di masa yang akan datang kondisinya akan berbeda, dikarenakan peluang tersebut akan semakin terbatas dengan permasalahan yang semakin kompleks tentunya.

8. Pada saat ini saja banyak masalah yang dihadapi petani untuk dapat meningkatkan produksinya, seperti terbatasnya luas lahan yang dikelola, rendahnya produktivitas karena rendahnya penerapan teknologi, adanya keluhan petani terhadap kelangkaan pupuk di lapangan, lemahnya aksesibilitas pada sumber-sumber modal, masih cukup tingginya kerusakan tanaman, perubahan iklim yang ekstrim dan sebagainya. Pada sisi lain kita juga dihadapkan pada adanya kecenderungan terus meningkatnya harga bahan bakar minyak yang sudah tentu akan mendorong naiknya harga termasuk bahan pangan.
9. Berbagai persoalan di atas menyebabkan kita semakin khawatir akan meningkatnya jumlah masyarakat yang mengalami rawan pangan seperti gizi kurang dan gizi buruk yang saat ini jumlahnya sudah cukup tinggi.

Sdr. Bupati/Walikota dan peserta rapat yang berhadagia.

Sehubungan dengan hal-hal yang saya sampaikan ini, saya menghimbau untuk kita bersama-sama berupaya untuk memecahkan berbagai persoalan tersebut antara lain dengan melakukan langkah-langkah berikut:

1. Memantapkan ketersediaan pangan untuk menuju kemandirian pangan.
 - untuk maksud tersebut kita perlu secara terus-menerus melakukan upaya peningkatan produksi bahan pangan, bukan hanya beras tetapi bahan pangan lainnya baik yang berasal dari tanaman pangan, peternakan, perikanan dan juga perkebunan, yaitu dengan mengoptimalkan pemanfaatan semua sumber daya yang ada khususnya lahan termasuk pekarangan, serta dengan meningkatkan penerapan teknologi. Dengan demikian kita tidak lagi tergantung pada pemasukan dari luar khususnya untuk komoditi strategis seperti beras, jagung dan komoditi lainnya yang memang dapat kita produksi di dalam daerah.

- Menyikapi adanya keluhan petani tentang sulitnya memperoleh pupuk bersubsidi belakangan ini, saya mengharapkan agar masalah ini dapat terselesaikan secara tuntas melalui koordinasi instansi terkait. Apabila diketahui adanya kelangkaan tersebut dikarenakan oleh ulah oknum, saya mintakan agar segera di ambil langkah hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di samping itu sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 7 tahun 1996 dan PP Nomor 68 Tahun 2002, kiranya perlu dikembangkan cadangan pangan pada berbagai lini, mulai di provinsi, kabupaten/kota bahkan sampai tingkat desa yang diharapkan dapat mengatasi adanya masalah mendesak sekaligus mendukung cadangan pangan nasional yang selama ini memang sudah berkembang. Kepada masyarakat juga didorong untuk mengembangkan lumbung pangan.
2. Mendorong petani untuk memanfaatkan momen naiknya harga pangan dengan meningkatkan produksi pangan, sehingga naiknya harga pangan dapat memberikan pengaruh positif bagi kehidupan petani bukan sebaliknya.
 3. Secara konsisten berupaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran. Hal ini penting mengingat masyarakat miskin dan pengangguran merupakan kelompok masyarakat yang paling rentan dan berpeluang besar mengalami kerawanan pangan. Berbagai kegiatan yang tergabung dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) telah dilaksanakan, dan mulai pada tahun 2008 melalui Departemen Pertanian sedang dipersiapkan pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang tersebar di 244 desa pada 12 kabupaten. Mengingat cukup banyak program yang terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran ini, saya mengharapkan agar dalam pelaksanaannya dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi sehingga berjalan efektif.

4. Memberikan dorongan kepada masyarakat untuk melakukan diversifikasi makanan dengan mengurangi ketergantungan terhadap bahan pangan tertentu seperti beras dan bahan pangan import. Terkait dengan hal itu masyarakat perlu terus diberikan pemahaman dan diarahkan untuk menerapkan pola konsumsi beragam, bergizi seimbang dan aman dengan menggunakan bahan pangan lokal dan mengurangi konsumsi bahan pangan import. Demikian pula dengan daerah-daerah yang lahan sawahnya terbatas diharapkan masyarakat tidak memaksakan pemenuhan karbohidratnya pada beras. Saya memahami hal itu bukan hal yang mudah mengingat hal itu menyangkut kebiasaan makan yang sudah turun-temurun, dan bahkan sebagian masyarakat mengaitkannya dengan prestise gengsi, artinya bila ada masyarakat yang makan ubi maka dianggap sudah mengalami kelaparan.

Pola pikir seperti itu harus diluruskan. Upaya menerapkan pola konsumsi beragam, bergizi seimbang dan aman adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pangan guna membentuk manusia yang berkualitas. Erat kaitannya dengan hal itu, saya menghimbau agar aparat dapat memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan mengurangi konsumsi beras dan menggantikannya dengan mengkonsumsi bahan pangan lokal lainnya, termasuk konsumsi pada acara-acara pertemuan. Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan kepada kita semua, apabila ada masyarakat kita yang makan ubi sebagai pengganti atau pencampur beras hendaknya hal itu tidak dipersoalkan, yang penting bagaimana masyarakat dalam menerapkan pola konsumsi perlu menyertainya dengan bahan pangan lain seperti sumber protein, vitamin dan mineral dalam jumlah yang cukup sehingga pangannya tetap berkualitas.

5. Mengembangkan sistem kewaspadaan pangan dan gizi sebagai langkah untuk melakukan deteksi dini tentang kemungkinan terjadinya kasus rawan pangan dan gizi. Hal ini antara lain dilakukan dengan mengaktifkan kembali Posyandu dan meningkatkan tim penggerak PKK pada berbagai tingkatan dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pola hidup sehat.

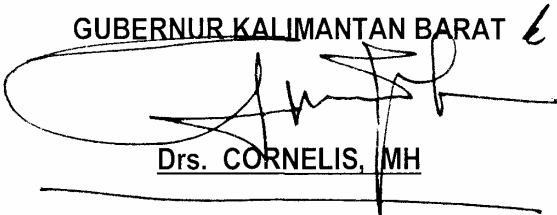
Dengan demikian adanya gejala rawan pangan sejak awal sudah dapat diketahui sehingga dapat diambil langkah pencegahannya dalam waktu relatif singkat.

6. Melakukan intervensi terhadap adanya kasus-kasus gizi buruk dan kurang gizi secara cepat dan tepat agar tidak memberikan pengaruh negatif bagi perkembangan kesehatan dan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang.
7. Melakukan penanganan pasca intervensi kesehatan terhadap pasien gizi kurang dan gizi buruk, dengan langkah penanganan sanitasi lingkungan perumahan, pendidikan dan penyuluhan terhadap tata cara hidup sehat.
8. Melakukan pengawasan dan mengupayakan agar harga gabah tidak jatuh di bawah harga dasar sebagaimana yang ditetapkan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2008 sebagai pengganti Inpres Nomor 3 Tahun 2007.
9. Melakukan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi agar betul-betul sampai kepada petani.
10. Melakukan pengawasan terhadap aliran beras khususnya di daerah perbatasan sebab bukan tidak mungkin karena adanya perbedaan harga beras yang cukup tajam antara di negara kita dengan di negara tetangga akan mendorong mengalirnya beras ke negara tetangga hal ini dapat mengganggu tingkat ketahanan pangan kita baik secara nasional maupun daerah Kalimantan Barat.
11. Dalam rangka menyambut perayaan Hari Besar Keagamaan, seperti bulan puasa, Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru, yang waktunya juga semakin dekat, di mana biasanya akan terjadi peningkatan permintaan beberapa bahan pangan sehingga harganya juga akan meningkat, maka perlu dilakukan langkah antisipasi seperti pemantauan harga dan inspeksi pasar, pemantauan aliran bahan pangan, operasi pasar bazar dan lain sebagainya.
12. Saya mengharapkan agar di daerah juga dilakukan rapat-rapat Dewan Ketahanan Pangan seperti ini, untuk memecahkan masalah-masalah yang dapat mengganggu ketahanan pangan di daerah.

13. Kepada seluruh instansi terkait di tingkat provinsi saya mengharapkan agar berbagai kegiatan dan penanganan masalah yang dengan upaya mewujudkan ketahanan pangan ini dapat dilaksanakan secara konsisten.

Sdr. Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Sdr. Bupati/Walikota yang berbahagia:

Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Selanjutnya marilah kita melakukan diskusi untuk membahas persoalan ketahanan pangan dan upaya pemecahannya di berbagai daerah.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 
Drs. CORNELIS, MH